



RENCANA

KERJA

PERUBAHAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.3.1.Maksud Penyusunan Renja Perubahan	2
1.3.2.Tujuan Penyusunan Renja Perubahan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	4
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	8
3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN	8
3.2. RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	8
BAB VI. PENUTUP	13

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja Badan Pendapatan adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali dengan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Bapenda Tahun 2021 -2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025. Perubahan dalam Renja Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan yang didasarkan pada pagu pergeseran Bapenda diawal Triwulan II Tahun Anggaran 2025 Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Bapenda Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga memberi dampak yang optimal bagi pencapaian peningkatan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :

- 1) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

- 4) Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1.Maksud Penyusunan Renja Perubahan

Maksud Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan sesuai tugas, fungsidan kewenangannya.

1.3.2.Tujuan Penyusunan Renja Perubahan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Renstranya dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu serta indikator kinerjanya yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan rancangan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PEDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II.EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Demikian halnya dengan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Belanja
Sampai Dengan Triwulan II Berjalan (s/d April)
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI TRW I		
			FISIK (%)	KEUANGAN	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.358.146.028,-	19.52	2.021.571.717	19.52
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	184.536.200,-	17.60	32.486.000	17.60
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.979.414.300,-	15.68	310.426.000	15.68
	JUMLAH	12.522.096.528,-	18.88	2.364.483.717	18.88

Kinerja program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 3 program, 10 kegiatan dan 36 sub kegiatan sampai dengan Triwulan II (s/d April 2025) Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 2.364.483.717,- dari target Rp. 12.522.096.528,- atau (18,88%) .Seluruh program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah telah mendukung sasaran kinerja pada indikator tujuan/sasaran pada Renstra perangkat daerah. Berikut tabel Program dan kegiatan yang berkaitan dengan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran Triwulan II (s/d April 2025)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Fisik %	Realisasi Keuangan	
				Nilai	%
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.522.096.528	19.52	2.021.571.717	19.52
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	191.217.800			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	191.446.800	24.49	46.877.666	24.49
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.213.707.528	22.60	1.404.540.141	22.60
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	290.520.000			
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	81.714.500	2.78	2.275.000	2.78
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	105.064.000			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	314.241.000			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.765.700			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.569.500			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.984.600	14.36	2.870.000	14.36
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.317.800	14.41	23.240.000	14.41
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84.296.400	20.05	16.900.000	20.05
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.602.000	47.93	92.305.010	47.93
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	53.468.000			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Mebel	33.388.400			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	8.40	630.000	8.40
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.966.000	33.35	39.345.000	33.35
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.656.800			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.918.969.200	20.46	392.588.900	20.46
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.650.000			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.100.000			

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Paqu Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	
			%	Nilai	%
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	184.536.200	17.60	32.486.000	17.60
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	184.536.200	17.60	32.486.000	17.60
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.979.414.300	15.68	310.426.000	15.68
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	18.484.500			
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	113.976.400	40.20	45.814.400	40.20
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	112.377.200			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	379.720.200			
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	108.718.000	15.44	16.790.000	15.44
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	120.298.900	24.21	29.123.200	24.21
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	326.886.600	16.93	55.336.000	16.96
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	129.319.600	32.96	42.630.000	32.96
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	101.549.800	26.52	26.930.000	26.52
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	102.909.000	17.78	18.300.000	14.78
	Penagihan Pajak Daerah	130.522.300	21.28	27.780.000	21.28
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	109.960.100			
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	75.490.700	17.91	13.520.000	17.91
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	71.598.900	47.77	34.202.400	47.77
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	77.601.900			

Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan di dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 tentunya muncul hal – hal yang menjadi faktor pendorong maupun sebagai faktor penghambat pencapaian kinerja perangkat daerah, khususnya pada tahun 2025. Adapun faktor pendorong dan penghambat tersebut adalah :

1. Faktor Pendorong :

- a. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur.
- b. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang di laksanakan oleh Kepala Badan
- c. Tingginya komitmen Pegawai Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kinerja

2. Faktor Penghambat :

- a. Realisasi kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan belum sesuai dengan rencana Anggaran Kas
- b. Adanya penerapan KKPD namun fisik kartu belum di terima oleh bendahara pengeluaran BAPENDA sehingga untuk dana KKPD yang diperuntukkan barang/jasa dan perjalanan dinas belum bisa di realisasikan.
- c. Nilai UP Tunai di luar KKPD kecil yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan lapangan menjadi terbatas.

Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mengambil beberapa langkah dalam menyikapi factor – factor penghambat tersebut di atas yakni sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan pembagian UP tunai agar kegiatan – kegiatan lapangan dapat terlaksana.
- b. Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai penerbitan KKPD.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu merumuskan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu:

Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kegiatan :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.2. RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rincian Rencana Program dan Kegiatan untuk Perubahan Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
KEUANGAN			

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	191.217.800	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	191.446.800	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.213.707.528	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	290.520.000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan rekonsiliasi dan penerimaan dari retribusi		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	81.714.500	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		
Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan	105.064.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	314.241.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	76.765.700	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	240.569.500	394.576.300
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang di Sediakan	19.984.600	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	161.317.800	209.767.800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	84.296.400	87.780.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.602.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.468.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Mebel dan Peralatan Mesin Lainnya		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33.388.400	40.236.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	117.966.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.656.000	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.918.969.200	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	43.650.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.100.000	25.200.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	184.536.200	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi		
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	18.484.500	0
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	113.976.400	492.745.400
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	112.377.400	117.737.400
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	379.720.200	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	108.718.000	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	120.298.900	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	326.886.600	386.886.600

Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	129.319.600	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	101.549.800	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	102.909.000	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	130.522.300	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	109.960.100	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	umlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	75.490.700	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	71.598.900	
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	77.601.900	

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator – indikator kinerja dan target perubahan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Penyusunan Renja perubahan tahun 2025 ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2025 dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun secara organisasi. Disamping itu untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban visi dan misi pemerintah daerah untuk menuju terciptanya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten Mahakam Ulu.

Ujoh Bilang, 21 April 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU



JOSMAN, S.IP
Pembina TK 1 (IV b)
NIP. 19720610 200604 1 021